UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau
Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

# DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau
Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau
Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

**Putusan Peradilan Indonesia**

Putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1441/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

Putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1847/Pdt.G/2025/PA.Sdn.

Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Sidrap.

Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 394/Pdt.G/2024/PA.Clg.

Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Jbg.

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1247/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 2948/Pdt.G/2025/PA.Pml.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 208/Pdt.G/2024/PTA Sby.

**Buku**

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Dewi, Anggita Mustika, Iin Suny Atmadja, Deasy Widya Sari, Honggo Sigit Nurcahyo, Rio Kustianto Wironegoro, R. Sumendro, dan Theresia Pustiva Dewi. *Akta Notaris Konsep, Struktur Dasar, dan Teknik Penyusunan*. Malang: Setara Press, 2024.

Djalil, H.A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh.* Jakarta: Kencana, 2006.

Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Hartanto, J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan).* Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau
Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya.* Jakarta: Universitas Trisakti, 2015.

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: BayuMedia, 2014.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 2009.

MK, H.M Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

_____. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.

Mustofa. *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT.* Sleman: KaryaMedia, 2010.

Nugraheni, Destri Budi dan Haniah Ilhami. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Panggabean, Henry Pandapotan. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Sihombing, Eka N.A.M dan Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau
Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.

Subekti. *Aneka Perjanjian.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sumardjono, Maria S.W. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadah Mada, 2019.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: CV Rajawali, 1989.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Wattimena, Husin, Hasan, dan Muis Pikahulan. *Pembuktian Tindak Pidana Sebagai Penguat Gugatan Perceraian (Studi Kompetensi Absolut Peradilan Agama.* Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

**Artikel Jurnal**

Bestari, Gabriella Sekar Mayang dan Vincensia Esti Purnama Sari. "Keabsahan Surat Pernyataan Kerelaan Ahli Waris dalam Proses Balik Nama Hak Atas Tanah Karena Pewarisan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta". *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 11 (Januari 2025): 269-285. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i1.6670.

Darwin, Merah dan Adnan Hamid, dan Tetti Samosir. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil: (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid.B/2022/PN Jkt Brt)". *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025): 1-43. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1496.

Farah, Nadia Isad. "Implikasi Perbedaan Pemaknaan dan Pemberian Salinan Akta Wasiat Notariil di Kabupaten Bantul". *Recital Review* 5, no. 2 (2023): 245-265. https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.27083.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau
Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

Fasil, Maulana Rihdo Al, Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, Fauziyah Putri Meilinda. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan, dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum". *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (Oktober 2023): 230-240. https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791.

Lebang, Aprianto Sandry, Caecilia Johanna Julietta Waha, dan Rudolf Sam Mamengko. "Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Dibawah Umur". *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024): 1-11.

Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah". *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (Januari 2024): 109-123. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i1.219.

Polontalo, Enry Muhamad Rizky, Nur Mohamad Kasim, dan Mutia Ch. Thalib. "Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo). *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (Juni 2023): 751-762. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4912.

Purwanto, Ahmad Edi. "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Sengketa Harta Bersama: Analisis SEMA No. 1 Tahun 2022 dengan Teori Fath al-Zari'ah dan Sadd al-Zari'ah". *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 2 (September 2025): 253-272. https://doi.org/10.20885/abhats.vol6.iss2.art12.

Rosa, Nirmala dan Arsin Lukman. "Mekanisme Yang Dilakukan PPAT Untuk Mencegah Tidak Diketahuinya Perjanjian Sewa Menyewa atas Tanah Objek Jual Beli Oleh Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Hadapan PPAT". *Unes Law Review* 7, no. 3 (Maret 2025): 945-953. https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i3.2399.

Saputra, Ahmad Dani Agustian, Diah Cahyani, dan Reyhana. "Wasiat Sebagai Sarana Perlindungan Hak Ahli Waris: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Agama Sby No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023)". *Journal Education and Government Wiyata* 3, no. 3 (Agustus 2025): 681-689. https://doi.org/10.71128/e-gov.v3i3.322.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Implikasi Putusan Hakim terhadap Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berupa Sebidang Tanah dan/atau
Rumah Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**
Alma Swasti, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I.
**Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/**

**Tesis/Disertasi**

Alizon, Joni. "Konstruksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia Tinjauan *Maqashid* Syariah", Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Nisa, Jamiyatun. "Tinjauan Filosofis Terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022)", Tesis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

**Internet**

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. "Implikasi". https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi (diakses pada tanggal 27 Desember 2025).